

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Yayasan

Pengertian Panti Asuhan menurut KBBI yaitu sebagai rumah tempat memelihara dan merawat anak yatim piatu dan sebagainya. Departemen Sosial Republik Indonesia menjelaskan bahwa:

“Panti asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak telantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti fisik, mental, dan sosial pada anak asuh, sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif didalam bidang pembangunan sosial.”

Menurut Bastian (2007) yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang social, keagamaan, dan kemanusiaan. Menurut Nainggalon (2005) yayasan merupakan suatu lembaga yang didirikan bukan untuk mencari laba semata (nirlaba). Borahima (2002) mengatakan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2001 dibuat undang-undang yang mengatur mengenai yayasan yaitu undang-undang (UU) Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dimuat dalam Lembaga Negara (LN) No 112/2001 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) 4123. Bagi organisasi nirlaba yang berbadan hukum yayasan serta menurut UU No.28 Tahun 2004 mengenai yayasan, yayasan diwajibkan menyusun laporan tahunan yang terdiri dari dua komponen, yaitu laporan kegiatan dan laporan keuangan. Yayasan yang memperoleh bantuan lima ratus juta atau lebih; atau mempunyai kekayaan diluar harta kekayaan wakaf sebesar dua puluh lima miliar atau lebih diaudit oleh akuntan publik dan mengumumkannya dalam surat kabar harian. Kewajiban hukum tersebut lebih menegaskan lagi adanya kebutuhan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi organisasi nirlaba yang berbadan hukum yayasan. UU No. 14 Tahun 2008 rentang keterbukaan informasi publik semakin mempertegas kewajiban tersebut, dan tidak hanya mencakup badan

hukum yayasan semata (bahkan berlaku bagi organisasi nirlaba yang tidak berbadan sekalipun!).Sebelumnya, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang yayasan di Indonesia. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa Indonesia sama sekali tidak ada ketentuan yang mengatur yayasan.Ketentuan perundang-undangan yang ada pada waktu itu, tidak satupun yang memberikan rumusan mengenai defenisi yayasan, status hukum yayasan,serta cara mendirikan yayasan. Berbeda halnya dengan di Belanda, yang secara tegas didalam undang-undangnya menyebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum.

Untuk diakui sebaga badan hukum, yayasan hanya perlu memenuhi syarat tertentu, yaitu:

- 1) Syarat materil yang terdiri dari; harus ada suatu pemisahan harta kekayaan,adanya suatu tujuan, dan mempunyai suatu organisasi
- 2) Syarat formil yaitu harus dengan akta autentik.

Di dalam praktek hukum yang berlaku di Indonesia, pada umumnya yayasandidirikan dengan akta notaris. Akta notaris ini ada didaftarkan pengadilan negeri,dan diumumkan dalam Berita Negara. Hal ini dikarenakan tidak ada ketentuan yang mengatur Yayasan tersebut sehinggapendirian yayasan tersebut tujuan dan bentuk yaysan tersebut masih secara umum dan bukan spesifik. Dengan demikan, yayasan dapat juga didirikan dengan akta dibawah tangan. Setelah keluarnya UU Yayasan, secara otomatis penentuan status badan hukum yayasan harus mengikuti ketentuan yang ada dalam UU Yayasan tersebut. Dalam UU Yayasan disebutkan bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri.

Dari ketentuan UU yayasan dapat disimpulkan bahwa ada beberapa syaratpendirian, yaitu:

1. Didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih;
2. Ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya;
3. Harus dilakukan dengan aktanotaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia;
4. Harus memperoleh pengesahan Menteri;
5. Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
6. Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasanlain,atau bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
7. Nama yayasan harus didahului dengan kata “Yayasan”.

2. Akuntansi Yayasan

Menurut Nainggolan (2005) lembaga berbentuk yayasan bergerak dalam berbagai variasi bentuk kegiatan. Beberapa fokus ke kegiatan advokasi dan pendampingan masyarakat sedangkan yang lainnya terjun keimplementasi program untuk secara langsung menyelesaikan suatu isu yang berkembang. Sejalannya dengan perkembangan masyarakat yang semakin kritis, kini terjadi pemantuan serta pemeriksaan atas keberadaan yayasan maupun lembaga nirlaba yang ada. Masyarakat menuntut diterapkan good governance atau tata kelola organisasi yang baik pada yayasan. Pada pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas harus dapat dibuktikan.

Transparansi dan akuntabilitas memerlukan infrastruktur yang memadai agar pengelolaan administrasi dapat dilakukan secara maksimal. Demikian juga pemenuhan kewajiban perpajakan hanya dapat dilakukan bila system keuangan sudah berjalan baik. Di samping itu, stakeholders yayasan termasuk para pemberi sumbangan dan jika pendapatan yayasan berasal dari public maka secara jelas memerlukan segala informasi tentang pengelolaan yayasan tersebut. Dengan demikian, pentingnya sistem keuangan yayasan karena terkait oleh kebutuhan stakeholdernya. Akuntansi sebagai salah satu untuk menghasilkan informasi yang berkaitan dengan keuangan lembaga dapat mendorong keterbukaan lembaga. Dengan sistem dan prosedur keuangan yang terstruktur, lembaga dapat dengan mudah memenuhi tuntutan transparansi kepada stakeholdernya. Pelaporan yang tepat waktu dan diikuti dengan kualitas informasi yang tinggi pada satu sisi dapat mendorong keterbukaan, pada sisi yang lain justru menjadi umpan balik kepada internal lembaga.

3. Organisasi NirLaba

Organisasi Nirlaba sering juga disebut dengan istilah organisasi non profit atau organisasi non bisnis. Widodo dan Kustiawan (2001) memberikan pengertian organisasi nirlaba adalah suatu instansi yang menjalankan kegiatan operasinya dengan tidak mencari laba atau keuntungan. Lembaga atau organisasi nirlaba merupakan suatu lembaga atau kumpulan dari beberapa individu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, dalam pelaksanaannya kegiatan yang dilakukan tidak berorientasi pada pemupukan laba atau kekayaan semata (Nainggolan, 2005). Menurut PSAK No. 45 tahun 2010 menyebutkan karakteristik organisasi nirlaba sangat berbeda dengan organisasi bisnis yang

berorientasi untuk memperoleh laba. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya.

a) Perbedaan organisasi nirlaba dengan organisasi laba

Banyak sekali hal – hal yang membedakan diantara kedua lembaga tersebut. Misalnya saja dalam hal kepemilikan, pada lembaga non profit tidak jelas siapa sesungguhnya pemilik dari lembaga tersebut, apakah dia anggota, klien atau bahkan donatur. Pada lembaga profit yang dimiliki oleh stakeholder, maka pemilik akan secara jelas mendapatkan keuntungan dari hasil usaha organisasi tersebut.

Selain itu dalam hal donatur, lembaga non profit sangat membutuhkan donatur sebagai sumber pendanaannya. Berbeda dengan lembaga profit yang telah memiliki sumber pendanaan jelas yang berasal dari investor maupun modal pemilik untuk mencari keuntungan usahanya.

Begitu pula dalam hal penyebaran tanggung jawab pada lembaga profit maka akan secara jelas diketahui siapa komisaris yang kemudian memilih seorang direktur pelaksana. Sedangkan pada organisasi non profit, hal seperti itu tidak dapat dilakukan secara mudah, sebab anggota dewan komisaris bukanlah pemilik organisasi maupun struktur organisasi tersebut tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.

b) Ciri – Ciri Lembaga NonProfit

- Tidak adanya kepemilikan seperti pada organisasi bisnis pada umumnya
- Menghasilkan suatu barang maupun jasa yang tidak mempunyai tujuan untuk mendapatkan laba semata, jika terdapat keuntungan maka jumlahnya pun tidak pernah di bagikan kepada para pendiri atau pemilik organisasi tersebut
- Sumber daya atau dana yang di dapat berasal dari para penyumbang yang tidak berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan atas apa yang telah di berikan

c) Karakteristik Organisasi Nirlaba

Dalam ruang lingkup PSAK No. 45 tahun 2010 dikatakan bahwa sebuah organisasi nirlaba harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- Sumber daya entitas nirlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
- Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut.
- Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas nirlaba bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba.

Berdasarkan penjelasan diatas secara umum yang dikatakan organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak mempunyai motif untuk mencari keuntungan. Hal inilah yang membedakan dengan organisasi bisnis lainnya. Selain perbedaan tersebut, terdapat persamaan karakteristik dengan organisasi bisnis lainnya yaitu salah satunya merupakan bagian yang integral dari sistem perekonomian yang sama dan memanfaatkan sumber daya serupa dalam rangka mencapai tujuan (Fitriyah, 2012).

d) Klasifikasi Organisasi Nirlaba

Menurut Kotler melalui bukunya “Strategi pemasaran untuk organisasi nirlaba” (2003) yang dikutip oleh Fitriyah (2012) mengatakan bahwa organisasi nirlaba dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Badan pemerintahan yang dibentuk dengan Undang-Undang dan diberi wewenang untuk memberi pelayanan dan memungut pajak.
- Organisasi nonprofit swasta atau sektor independen yang biasanya beroperasi sebagai organisasi bebas pajak, tetapi diorganisir di luar wewenang pemerintah dan perundang-undangan. Organisasi itu mungkin bergerak di bidang pendidikan, pelayanan kemanusiaan, perdagangan, atau perhimpunan profesi.
- Organisasi swasta atau pemerintah yang dibentuk dengan wewenang legislatif dan biasanya disertai monopoli yang terbatas untuk memberikan pelayanan atau

menyediakan barang kebutuhan tertentu kepada kelompok-kelompok masyarakat Organisasi umumnya bergerak di bidang utilitas, seperti listrik, air, dan gas.

Dari pengklasifikasian diatas, yayasan (termasuk panti asuhan) yang mendapatkan donasi dari anggota yang tidak mengharapkan imbalan termasuk ke dalam kategori lembaga nirlaba donasi. Yayasan yang mendirikan sekolah atau rumah sakit termasuk golongan lembaga nirlaba yang komersial karena pendapatannya diperoleh dari pemakai jasanya.

4. PSAK 45

PSAK 45 tidak spesifik mengatur tentang akuntansi yayasan melainkan mengatur Akuntansi untuk organisasi nirlaba. PSAK 45 juga tidak menyatakan dengan pasti bahwa akuntansi yang diatur di dalamnya ditentukan berdasarkan system dana. Namun apabila dicermati, terlihat seperti system dana. Dana dalam PSAK 45 bersifat single entity, yaitu hanya jenis laporan untuk masing – masing kategori, yaitu: satu neraca , satu laporan aktivitas , dan satu laporan arus kas. Semua unsur rekening masuk dalam neraca, aktiva lancar dan aktiva tetap, utang jangka pendek dan utang jangka panjang, serta aktiva bersih (seperti saldo dana). Aspek yang membuat PSAK 45 seperti system dana terletak pada ketentuan sebagai berikut:

- Sumber penerimaan dari pihak lain, donator atau pemerintah, yang ada ketentuan terbatas atau tidak terbatas (unrestricted atau unrestricted) dalam penggunaan harus dipisahkan rekeningnya.
- Aktiva bersih (seperti saldo dana atau ekuitas dalam akuntansi komersial) dikelompokkan dalam berbagai rekening seperti : aktiva bersih terikat permanen, aktiva bersih terikat temporer, dan aktiva bersih tidak terikat.

Dalam PSAK 45 karakteristik organisasi nirlaba berbeda dari organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang di butuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis, misalnya penerimaan sumbangan. Namun demikian, dalam praktik organisasi sering tampil dalam berbagai bentuk, sehingga sering sulit dibedakan dengan organisasi bisnis pada umumnya. Pada beberapa bentuk organisasi nirlaba,

meskipun tidak ada kepemilikan, organisasi tersebut mendanai kebutuhan modal dari utang, dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa yang di berikan pada publik. Akibatnya, pengukuran jumlah, saat, dan kepastian aliran pemasukan kas menjadi ukuran kinerja penting bagi para pengguna laporan keuangan organisai tersebut, seperti kreditor dan pemasok dana lainnya. Organisasi semacam ini memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan organisasi bisnis pada umumnya.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 mengenai Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Ikatan Akuntan Indonesia selaku otoritas yang berwenang menyusun standar akuntansi di Indonesia menetapkan standar khusus bagi organisasi nirlaba dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Revisi 2011 sehingga suatu entitas nirlaba dalam menyusun laporan keuangannya mengacu pada PSAK 45 tersebut. Dengan adanya standar pelaporan tersebut diharapkan dapat diterapkan pada seluruh organisasi nirlaba di Indonesia mengingat pelaporan organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 45 yaitu sebagai berikut:

- Laporan Posisi Keuangan
- Laporan Arus kas
- Laporan Aktivitas
- Dan Catatan Atas Laporan Keuangan

5. Laporan Keuangan

a) Pendahuluan

PSAK 45 secara eksplisit menyatakan bahwa karakteristik entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara entitas nirlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari entitas nirlaba tersebut. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam entitas nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam entitas bisnis, misalnya penerimaan sumbangan. Namun demikian, dalam praktik entitas nirlaba sering tampil dalam berbagai bentuk, sehingga sering kali sulit dibedakan dengan entitas bisnis pada umumnya. Pada beberapa bentuk entitas nirlaba, meskipun tidak ada kepemilikan, entitas nirlaba tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari utang, dan kebutuhan operasinya dari

pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya, pengukuran jumlah, saat, dan kepastian aliran kas masuk menjadi ukuran kinerja penting bagi para pengguna laporan keuangan entitas nirlaba tersebut, seperti kreditor dan pemasok dana lainnya. Entitas semacam ini memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan entitas bisnis pada umumnya.

Para pengguna laporan keuangan entitas nirlaba memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan entitas bisnis, yaitu untuk menilai: (a) jasa yang diberikan oleh entitas nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut; (b) cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek kinerja manajer. Kemampuan entitas nirlaba untuk terus memberikan jasa dikomunikasikan melalui laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, aset neto, dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut. Laporan ini harus menyajikan secara terpisah aset neto baik yang terikat maupun yang tidak terikat penggunaannya. Pertanggung jawaban manajer mengenai kemampuannya mengelola sumber daya entitas nirlaba yang diterima dari para penyumbang disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas. Laporan aktivitas menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam kelompok aset neto

b) Tujuan Laporan Keuangan

PSAK 45 menyatakan bahwa tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba. Pihak pengguna laporan keuangan entitas nirlaba memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai:

- jasa yang diberikan oleh entitas nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut;
- cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerja mereka.

Secara rinci, tujuan laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, adalah untuk menyajikan informasi mengenai:

- jumlah dan sifat aset, liabilitas, dan aset neto entitas nirlaba;
- pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aset neto

- jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya;
- cara entitas nirlaba mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan factor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya; usaha jasa entitas nirlaba.

Setiap laporan keuangan menyediakan informasi yang berbeda, dan informasi dalam laporan keuangan biasanya melengkapi informasi dalam laporan keuangan yang lain.

6. Laporan Keuangan Entitas Nirlaba

Laporan keuangan entitas nirlaba meliputi laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode laporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan (PSAK 45).

a) Laporan Posisi Keuangan

Didalam PSAK Nomor 45 tahun 2014 dijelaskan bahwa tujuan laporan posisi keuangan yaitu menyediakan informasi keuangan mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi mengenai hubungan di antara unsur–unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak–pihak lain untuk menilai:

1. Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara keberlanjutan
2. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Laporan posisi keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aset dan kewajiban. Informasi tersebut umumnya disajikan dengan pengumpulan aset dan liabilitas yang memiliki karakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen. Sebagai contoh, organisasi biasanya melaporkan masing-masing unsur aset dalam kelompok yang homogen, seperti:

- Kas dan setara kas
- Piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa yang lain
- Persediaan
- Sewa, asuransi, dan jasa lainnya yang dibayar di muka
- Surat berharga/efek dan investasi jangka panjang

- Tanah, gedung, peralatan, serta aktiva tetap lainnya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa.

b) Laporan Aktivitas

Ikatan Akuntansi Indonesia (2014) dalam Mutammimah, dkk (2019) menyatakan bahwa tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset bersih, hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Ada tiga bentuk laporan aktivitas yang disajikan sebagai contoh dan setiap bentuk memiliki keunggulan yaitu:

- Bentuk A menyajikan informasi dalam kolom tunggal. Bentuk A ini memudahkan penyusun laporan aktivitas komperatif.
- Bentuk B menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi aset neto, satu kolom untuk setiap klasifikasi dengan tambahan satu kolom untuk jumlah. Bentuk b menyajikan bentuk pembuktian dampak berakhirnya pembatasan pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali aset tertentu terhadap relaksifikasi aset neto. Bentuk B memungkinkan penyajian informasi agregat mengenai sumbangan dan penghasilan dari investasi.
- Bentuk C menyajikan informasi dalam dua laporan dengan jumlah ringkasan dari laporan pendapatan, beban, dan perubahan terhadap aset neto tidak terikat disajikan dalam laporan perubahan aset neto. Pendekatan bentuk C ini menitikberatkan perhatian pada perubahan aset neto yang tidak terikat. Bentuk ini sesuai untuk entitas nirlaba yang memandang aktivitas operasi sebagai aktivitas yang terpisah dari penerimaan pendapatan terikat dari sumbangan dan investasi.

c) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas dalam entitas nirlaba menurut PSAK 45 bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2: Laporan Arus Kas atau SAK ETAP dengan tambahan berikut:

- Aktivitas

Yang termasuk dalam kelompok aktivitas pendanaan adalah perkiraan yang terkait dengan transaksi berupa penciptaan atau pelunasan kewajiban hutang lembaga dan kenaikan/penurunan aktiva bersih dari surplus-defisit lembaga. Transaksi lain yang mengakibatkan perubahan arus kas masuk dan keluar dalam kelompok ini adalah sebagai berikut: (i) penerimaan kas dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali yang penggunaannya dibatasi dalam jangka panjang (ii) penerimaan kas dari sumber daya dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aset tetap atau peningkatan dana abadi (iii) bunga dan deviden yang dibatasi penggunaannya dalam jangka panjang.

- Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas, misalnya sumbangan berupa bangunan atau aset investasi.

Menurut SAK No. 45 (2014), tujuan utama dalam laporan arus kas ada 2 metode langsung dan metode tidak langsung

d) Catatan Atas Laporan Keuangan

Nainggolan (2005) dalam Mutammimah, dkk (2019) menyatakan bahwa catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan di atas yang bertujuan memberikan informasi tambahan tentang perkiraan-perkiraan yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Tujuan pemberian catatan ini adalah agar seluruh informasi keuangan yang dianggap perlu untuk diketahui pembacanya dapat diungkapkan. Catatan atas laporan keuangan juga dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dilakukan seperti misalnya metode penyusutan apa yang akan digunakan dalam menghitung biaya depresiasi aktiva tetap, berapa estimasi usia pakai aktiva tadi dan lain sebagainya

Fitriyah (2012) mengemukakan bahwa Catatan atas laporan keuangan adalah suatu catatan yang mengungkapkan tentang:

- Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan disajikan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
- Informasi yang disajikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas.

- Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian yang wajar.

7. Penelitian Terdahulu

Tabel1
Penelitian Terdahulu

No	Nama penulis & tahun	Judul artikel	Permasalahan penelitian	Tujuan penelitian	Variabel	Metodologi penelitian	Hasil/temuan	Perbedaan dengan penelitian yang kita lakukan
1	Norita Citra Yuliarti, thn des 2014	STUDI PENERAPAN PSAK 45 YAYASAN PANTI ASUHANYA BAPPENTIM JEMBER	informasi perhitungan laporan keuangan Yayasan harus dilakukan dengan benar. Untuk itu diperlukan adanya penyesuaian sejumlah rekening-rekening pada	Tujuan umum – penelitian ini bermaksud untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan pada organisasi nirlaba agar sesuai	Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pada YAYASAN PANTI ASUHAN YABAPPE NATIM	Metode analisis deskriptif Berdasarkan pendekatan ini peneliti akan mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data berupa laporan keuangan yayasan sehingga nantinya akan memberikan	Yayasan Panti Asuhan Yabbapenatim telah memenuhi peraturan undang-undang beramal untuk membuat laporan keuangan. Namun, komponen laporan keuangan yang	Hanya melihat kesesuaian penerapan psak 45 pada laporan keuangan Tanpa ada tindak lanjut.

			<p>laporan keuangan karena tidak semua metode akuntansi yang dipakai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.</p>	<p>dengan ketentuan yang ada pada psak 45.</p> <p>Tujuan khusus - Standar akuntansi yayasan diperlukan karena standar akuntansi menjadi kunci sukses lembaga pengelola yayasan dalam melayani masyarakat</p>	<p>JEMBER</p>	<p>gambaran yang jelas mengenai penerapan psak 45 pada Yayasan Panti Asuhan Yabappenatim Jembe</p>	<p>dibuat tidak lengkap dan tidak memenuhi komponen laporan keuangan sesuai dengan IAS 45, karena dana dan sumber daya manusia yang terbatas dikelola. Dalam hal pengungkapan ini yayasan panti asuhan belum membuat catatan atas laporan keuangan Dan untuk penyajian laporan</p>	
--	--	--	---	--	---------------	--	--	--

				sehingga lembaga ini harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya.			keuangannya Yayasan Panti Asuhan Yabbapenatim membuat dua laporan keuangan yaitu neraca sederhana dan laporan sumber dan pendayagunaan dana.	
2	Angelia N.M. Tinungki, R.J. Pusung, Juni 2014	PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA BERDASAR PSAK NO.45 PADA PANTI	Organisasi nirlaba di Indonesia saat ini masih cenderung menekankan pada prioritas kualitas program dan	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan pelaporan keuangan pada Panti	Variabelnya adalah Laporan keuangan yang ada berupa laporan pengeluaran, laporan	Metode penelitian deskriptif yang dengan teknik analisis kualitatif yang sifatnya menguraikan, menggambarkan serta membandingkan	Hasil penelitian menunjukkan laporan keuangan yang ada di Panti Sosial belum sesuai dengan penyusunan laporan	Penelitian ini hanya melihat penerapan PSAK 45 tanpa menindak lanjut kegunaannya

		<p>SOSIAL TRESNA WERDHA HANA</p>	<p>tidak terlalu memperhatikan pentingnya sistem pengelolaan keuangan. Padahal sistem pengelolaan keuangan yang baik diyakini merupakan salah satu indikator utama akuntabilitas dan transparansi sebuah lembaga. Pelaporan</p>	<p>Sosial Tresna Werdha Hana telah sesuai dengan apa yang telah tercantum pada PSAK No.45</p>	<p>realisasi dan laporan posisi kas menurut pemahaman mereka.</p>	<p>suatu data.</p>	<p>keuangan berdasarkan format laporan keuangan laba yang ada pada PSAK No. 45. Laporan keuangan yang ada berupa laporan pengeluaran, laporan realisasi dan laporan posisi kas menurut pemahaman mereka. Panti Sosial tidak menyajikan laporan posisi keuangan, laporan</p>	<p>pada kualitas pelayanan yayasan.</p>
--	--	--	---	---	---	--------------------	---	---

			serta pengelolaan keuangan yang sesuai itu diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba.				aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan	
3	I.R. Gultom., A.T. Poputra, Desember 2015	ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.45 TENTANG LAPORAN KEUANGAN ORGANISAS	Transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan sangat diperlukan.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan	Variabelnya adalah Laporan keuangan hanya berupa laporan	Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Sinode GMIM belum menyusun laporan	Beda obyek penelitian saya pada yayasan panti sosialo sedangkan ini adalah

		<p>I NIRLABA DALAM MENCAPAI TRANSPARA NSI DAN AKUNTABIL ITAS KANTOR SINODE GMIM</p>	<p>Transparansi dan akuntabilitas diperlukan agar pengguna laporan keuangan dapat mengerti kondisi dari perusahaan dan dapat menilai kinerja dari suatu perusahaan. Layaknya perusahaan, organisasi nirlaba pun memerlukan transparansi</p>	<p>PSAK No.45 dalam penyajian laporan keuangan Kantor Sinode GMIM.</p>	<p>realisasi anggaran belanja dan pendapatan yang disusun berdasarkan tata gereja GMIM.</p>	<p>keuangan sesuai PSAK No.45. Laporan keuangan hanya berupa laporan realisasi anggaran belanja dan pendapatan yang disusun berdasarkan tata gereja GMIM</p>	<p>pada gereja.</p>
--	--	---	---	--	---	--	---------------------

			<p>dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan organisasi nirlaba Ikatan Akuntan Indonesia telah membuat PSAK Nomor 45 tentang organisasi nirlaba. Penelitian ini dilakukan</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			pada Kantor Sinode GMIM yang merupakan salah-satu entitas nirlaba.					
4	Wawan Sukmana (2008)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK No.45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba	Tentang bagaimana manfaat psak 45 berguna mengontrol kualitas manager dalam pengambilan keputusan.	Bisa menjadi bahan pertimbangan peningkatan kualitas maneger dan kelangsungan kinerja yayasan.	variabel yaitu Total Quality Management	Metode penelitian dilakukan analisis deskriptif.	Penyajian laporan keuangan PSAK No.45 dan Total Quality Management berpengaruh terhadap kinerja	Terdapat variabel lain yaitu Total Quality Management

		Dan Penerapan Total Quality Management Terhadap Kinerja Yayasan. (Studi Kasus Yayasan Perguruan Tinggi Swasta di Tasikmalaya)					Yayasan.	
5	Sri Handayani	Pengaruh Penerapan PSAK No.45	Mengetahui Pengaruh	Sebagai pegangan dan sumbangan pemikiran	Variabel independen dalam penelitian ini	Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah kuesioner.	Penerapan PSAK No.45	Terdapat variabel lain yaitu Total Quality

	(2011)	dan Penerapan TQM terhadap Kinerja Yayasan (Studi Kasus Yayasan Advokasi dan Keagamaan di Jakarta)	Penerapan PSAK No.45 terhadap kinerja yayasan . dan mengapa yayasan belum menerapkan sistim pencatatan yang sesuai dengan PSAK No. 45	dalam menunjang ilmu akuntansi khususnya di bidang pemeriksaan keuangan dan khususnya pada PSAK No.45	adalah penerapan PSAK No.45. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja manajerial.	Karena data yang diperoleh bentuk ordinal, maka skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert.	dan Penerapan TQM berpengaruh terhadap Kinerja Yayasan	Management
--	--------	--	---	---	--	---	--	------------

8. Kerangka Pemecahan Masalah

Penelitian ini menganalisis penyajian laporan keuangan yang dilakukan Yayasan panti asuhan dengan mengacu pada ketentuan PSAK No 45 tahun 2010 serta UU No.28 Tahun 2004 yang mengatur tentang Yayasan yang mana kaitannya dengan pendirian Yayasan serta penyusunan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari dua komponen, yaitu laporan kegiatan dan laporan keuangan. Kewajiban hukum tersebut lebih menegaskan lagi adanya kebutuhan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi organisasi nirlaba yang berbadan hukum yayasan. UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik semakin mempertegas kewajiban tersebut, dan tidak hanya mencakup badan hukum yayasan semata (bahkan berlaku bagi organisasi nirlaba yang tidak berbadan sekalipun).

